

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

a. Definisi UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan batasan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja, yaitu untuk industri rumah tangga memiliki jumlah tenaga kerja 1 sampai 4 orang, usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang (Susanti, 2009).

Nurhayati (2011) menyebutkan definisi UMKM memiliki beragam variasi yang sesuai menurut karakteristik masing-masing negara yaitu:

1. World Bank : UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja \pm 30 orang, pendapatan per tahun US\$ 3 juta dan jumlah aset tidak melebihi US\$ 3 juta.
2. Di Amerika : UKM adalah industri yang tidak dominan di sektornya dan mempunyai pekerja kurang dari 500 orang.
3. Di Eropa : UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-40 orang dan pendapatan per tahun 1-2 juta Euro, atau jika kurang dari 10 orang, dikategorikan usaha rumah tangga.
4. Di Jepang : UKM adalah industri yang bergerak di bidang manufaktur dan retail/ service dengan jumlah tenaga kerja 54-300 orang dan modal ¥ 50 juta – 300 juta.
5. Di Korea Selatan : UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja \leq 300 orang dan aset \leq US\$ 60 juta.

6. Di beberapa Asia Tenggara : UKM adalah usaha dengan jumlah tenaga kerja 10-15 orang (Thailand), atau 5 – 10 orang (Malaysia), atau 10 -99 orang (Singapura), dengan modal \pm US\$ 6 juta.

Bank Indonesia (2011) mengemukakan terdapat beberapa negara yang mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja, diantaranya yaitu:

- a. El Salvador (kurang dari empat orang untuk usaha mikro, antara lima hingga 49 orang untuk usaha kecil, dan antara 50 – 99 orang untuk usaha menengah)
- b. Ekuador (kurang dari 10 orang untuk usaha mikro)
- c. Kolombia (kurang dari 10 orang untuk usaha mikro, antara 10 – 50 orang untuk usaha kecil, dan antara 51 – 200 orang untuk usaha menengah)
- d. Maroko (kurang dari 200 orang)
- e. Brazil (kurang dari 100 orang)
- f. Algeria (institusi non formal memiliki jumlah karyawan kurang dari 10 orang)

Beberapa negara memiliki standar yang berbeda dan ada pula yang menggunakan kombinasi dari berbagai tolok ukur dalam mendefinisikan UMKM berkaitan dengan dasar hukum. Afrika Selatan contohnya, menggunakan kombinasi antara jumlah karyawan, pendapatan usaha, dan total aset sebagai ukuran dalam kategorisasi usaha. Peru mendasarkan klasifikasi UMKM berdasarkan jumlah karyawan dan tingkat penjualan

per tahun. Costa Rica menggunakan sistem poin berdasarkan tenaga kerja, penjualan tahunan, dan total aset sebagai dasar klasifikasi usaha. Bolivia mendefinisikan UMKM berdasarkan tenaga kerja, penjualan per tahun, dan besaran asset. Sedangkan Republik Dominika menggunakan karyawan dan tingkat penjualan per tahun sebagai tolok ukur. Tunisia memiliki klasifikasi yang berbeda di bawah peraturan yang berbeda, namun terdapat konsensus umum yang mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah karyawan. Selain itu, ada pula beberapa negara yang menggunakan standar ganda dalam mendefinisikan UMKM dengan mempertimbangkan sektor usaha. Afrika Selatan membedakan definisi UMKM untuk sektor pertambangan, listrik, manufaktur, dan konstruksi. Sedangkan Argentina menetapkan bahwa sektor industri, ritel, jasa, dan pertanian memiliki batasan tingkat penjualan berbeda dalam klasifikasi usaha. Malaysia membedakan definisi UMKM untuk bidang manufaktur dan jasa, masing-masing berdasarkan jumlah karyawan dan jumlah penjualan tahunan (Bank Indonesia, 2011).

Adapun pengertian UKM menurut Suhardjono dalam Rafika (2010) mendefinisikan Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang – undang. Kriteria perusahaan di Indonesia dengan jumlah tenaga kerja 1 - 4 orang sebagai usaha rumah tangga, perusahaan dengan tenaga kerja 5 – 19 sebagai usaha kecil, perusahaan dengan jumlah tenaga kerja 20 - 99 sebagai

industri menengah, dan perusahaan dengan tenaga kerja lebih dari 100 orang sebagai usaha besar.

Menurut SK Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 05 Juni 1994 adalah “perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan nilai penjualan atau omset senilai Rp. 66 juta atau setinggi-tingginya Rp. 600 juta di luar tanah dan bangunan yang ditempati”. Apabila kita mengacu dari UU No. 9 tahun 1995 yang digunakan oleh Departemen Koperasi menetapkan kriteria “ usaha kecil sebagai usaha yang memiliki kekayaan bersih maksimum Rp 200 juta, diluar tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1 milyar dan dimiliki oleh warga Indonesia” tentang usaha kecil. Usaha sendiri, bukan anak perusahaan dari bentuk usaha perseorangan. Usaha kecil merupakan usaha informal oleh individu seperti usaha rumah tangga, pedagang kecil, kaki lima maupun asongan”. Istilah usaha kecil diartikan sebagai suatu segmen pengusaha dengan usahanya dilihat dari permasalahan ekonomi domestik (Faisal, 2002).

Menurut Martin (2000), Ciri-ciri usaha kecil – menengah antara lain :

- a. Pendidikan formal yang rendah
- b. Modal usaha kecil
- c. Miskin
- d. Upah rendah
- e. Kegiatan dalam skala kecil.

b. Peran dan fungsi Usaha Kecil dan Menengah

Fungsi dan peran Usaha Kecil dan Menengah sangat besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Fungsi dan peran itu meliputi:

- a. Penyediaan barang dan jasa
- b. Penyerapan tenaga kerja
- c. Pemerataan pendapatan
- d. Sebagai nilai tambah bagi produk daerah
- e. Peningkatan taraf hidup masyarakat

Bentuk pembinaan bagi Usaha Kecil dan Menengah sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan Sebagai sarana, bantuan serta bentuk nyata pembinaan usaha kecil yang tercatat selama ini diantaranya adalah :

- a. Sistem kemitraan usaha.
- b. Dana pembinaan BUMN 1-5 persen dari keuntungan bersih.
- c. Pembentukan lembaga penjamin kredit usaha kecil.
- d. Fasilitas kredit perbankan khususnya untuk pengusaha kecil.
- e. Kredit tanpa agunan (kredit kelayakan usaha).
- f. Pembentukan proyek pengembangan usaha kecil.
- g. Pembentukan proyek pengembangan hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat.
- h. Pembentukan forum komunikasi perbankan untuk pengembangan usaha kecil.

c. Kelebihan dan Kelemahan Usaha Kecil dan Menengah

1. Kelebihan usaha kecil dan menengah:

Pada kenyataannya, Usaha Kecil dan Menengah mampu tetap bertahan dan mengantisipasi kelesuan perekonomian yang mengakibatkan inflasi maupun berbagai faktor penyebab lainnya. Tanpa subsidi dan proteksi Usaha Kecil di Indonesia mampu berperan sebagai *buffer* (penyangga) dalam perekonomian masyarakat lapisan bawah. Menurut Harimurti (2009), secara umum perusahaanskala kecil baik perorangan maupun kerjasama memiliki kelebihan antara lain seperti :

1. Pemilik merangkap manajer perusahaan yang bekerja sendiri dan memiliki gaya manajemen sendiri, (merangkap semua fungsi manajerial seperti marketing , finance dan administrasi).
2. Perusahaan keluarga, dimana pengelolaanya mungkin tidak memiliki keahlian manajerial yang handal.
3. Sebagian besar membuat lapangan pekerjaan baru, inovasi, sumber daya baru serta barang dan jasa-jasa baru.
4. Resiko usaha menjadi beban pemilik.
5. Pertumbuhan yang lambat, tidak teratur, terkadang cepat dan prematur.
6. Fleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendek, namun tidak memiliki rencana jangka panjang.
7. Independen dalam penentuan harga produksi atau barang atau jasajasanya.

8. Prosedur hukumnya sederhana.
9. Pajak relatif ringan.
10. Kontak – kontak dengan pihak luar bersifat pribadi.
11. Mudah dalam proses pendiriannya.
12. Mudah di bubarkan setiap saat jika dikehendaki.
13. Pemilik mengelola secara mandiri dan bebas waktu.
14. Pemilik menerima seluruh laba.
15. Umumnya mempunyai kecenderungan mampu untuk survive.
16. Merupakan tipe usaha yang paling cocok untuk mengelola poduk, jasa atau proyek perintisan yang sama sekali baru atau belum pernah ada yang mencobanya, sehingga memiliki sedikit pesaing.
17. Terbukanya peluang dengan adanya berbagai kemudahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintah yang mendukung berkembangnya usaha kecil di Indonesia.
18. Diversifikasi usaha terbuka luas sepanjang waktu dan pasar konsumen senantiasa tergali melalui kreatifitas pengelola.
19. Relatif tidak membutuhkan investasi yang terlalu besar, tenaga kerja yang tidak berpendidikan tinggi, serta sarana produksi lainnya yang tidak terlalu mahal.
20. Meskipun tidak terlihat nyata, masing-masing usaha kecil dengan usaha kecil yang lain saling ketergantungan secara moril dan semangat berusaha.

Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan guna meningkatkan kinerja dan daya saing Usaha Kecil dan Menengah. Pendekatan pertama, adalah memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah agar mampu menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas. Beberapa dimensi kualitas produk adalah:

- a. Kinerja. Dimensi ini mengenai seberapa baik suatu produk melakukan apa yang semestinya dilakukan.
- b. Features. Menggambarkan pernik-pernik yang melengkapi atau meningkatkan fungsi dasar produk.
- c. Keandalan. Dimensi kualitas ini berkaitan dengan kemampuan produk untuk bertahan selama penggunaan yang biasa.
- d. Kesesuaian. Dimensi ini berkaitan dengan seberapa baik produk tersebut sesuai dengan standar. Untuk konsumen individu, kesesuaian lebih pada tercapainya standar – standar subyektif.
- e. Daya tahan. Daya tahan adalah ukuran umur produk, dan teknologi modern.
- f. Kemudahan perbaikan. Produk yang digunakan untuk jangka waktu lama sering harus diperbaiki atau dipelihara dan rancangan produk yang memudahkan perbaikan menambah nilai produk.
- g. Keindahan. Kualitas tidak selalu bergantung pada kemampuan fungsional. Keindahan suatu produk bagaimana produk tersebut dilihat dan dirasakan dapat menjadi dimensi yang penting.

- h. Persepsi terhadap kualitas. Dimensi ini tidak didasarkan pada produk itu sendiri tetapi pada citra atau reputasinya. Iklan, peringkat dari para pakar, dan pendapat teman dan keluarga dapat mempengaruhi persepsi kita pada kualitas produk.

d. Ketenagakerjaan

Untuk keperluan analisis ketenagakerjaan, secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua golongan yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagai tenaga kerja adalah penduduk yang berumur di dalam batas lama bekerja. Batas lama bekerja yang dianut oleh Indonesia adalah minimum 10 tahun, tanpa batas umur maksimum. Batas lama bekerja versi Bank Dunia adalah antara 15 hingga 64 tahun (Dumairy, 1996). Yang termasuk angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam lama bekerja yang bekerja, atau mempunyai pekerjaan, namun untuk sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam lama bekerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan.

Selanjutnya, angkatan kerja di bedakan pula menjadi sub kelompok yaitu pekerja dan penganggur. Yang dimaksud dengan pekerja adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang yang mempunyai dan saat ini memang sedang bekerja, serta orang yang mempunyai pekerjaan namun untuk sementara waktu kebetulan sedang

tidak bekerja. Adapun yang dimaksud dengan penganggur adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan (masih atau sedang) mencari pekerjaan.

e. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan sebagai sejumlah uang yang telah diterima pada pelanggan dari perusahaan sebagai hasil penjualan barang dan jasa. Yang dimaksud dengan pendapatan adalah jumlah penghasilan baik dari keluarga maupun perorangan dalam bentuk uang, yang diperolehnya dari jasa setiap bulan yang baik dari sebelumnya, atau dapat juga diartikan sebagai suatu hasil yang sedikit keberhasilan usaha, maka jumlah tersebut akan menjadi besar dan meningkat (Tohar, 2000).

Pendapatan rumah tangga adalah penghasilan dari seluruh anggota keluarga yang disambungkan untuk memenuhi kebutuhan bersama ataupun perorangan dalam rumah tangga.

Pendapatan rumah tangga dapat berasal dari satu macam sumber pendapatan, sumber pendapatan yang beragam tersebut dapat terjadi karena anggota rumah tangga yang bekerja melakukan lebih dari satu jenis kegiatan yang berbeda satu sama lain, faktor lain yang mempengaruhi terhadap keragaman sumber pendapatan adalah penguasa faktor produksi, pendapatan ini sendiri diperoleh sebagai

hasil bekerja atau jasa dan aset-aset sumbangan dari pihak lain. Kumpulan dan pendapatan dari berbagai sumber pendapatan tersebut merupakan total pendapatan rumah tangga.

Selain dari sektor sumber pendapatan rumah tangga, petani mungkin pula berasal dari sektor pertanian. Pendapatan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama diperoleh rumah tangga dengan melakukan kegiatan usaha tani atau berburu tani, kegiatan diluar sektir pertanian dapat berupa kegiatan usaha berburu atau usaha sendiri. Kegiatan ini pada umumnya membutuhkan sejumlah modal dan ketrampilan seperti dagang, jasa, dan usaha lain yang biasanya dilakukan apabila kegiatan pertanian sedang sepi atau mengisi waktu luang.

2. Sumber-sumber Pendapatan

Salah satu cara untuk mengetahui sumber pendapatan adalah dengan melihat sumber angka pendapatan nasional. Sumber angka pendapatan nasional dapat di bagi kedalam beberapa sektor. Menurut Tohar (2000), sektor-sektor pendapatan ini antara lain sebagai berikut :

- a. Pertanian, misalnya buah-buahan, susu sapi, perikanan dan lainnya.
- b. Industri, misalnya batik, keramik, garment, marmer dan lainnya.
- c. Pertambangan, misalnya biji besi, gas bumi, minyak tanah dan lainnya.
- d. Pariwisata, seni, dan budaya, misalnya obyek wisata dan hasil seni.
- e. Transportasi, misalnya *travel*, *taxi*, angkutan laut, angkutan udara.

- f. Telekomunikasi, misalnya jasa telepon.
- g. Perdagangan, misalnya eksportir, importir, pedagang besar dan pedagang eceran.
- h. Jasa-jasa, misalnya konsultasi hukum, perbengkelan, dan restoran.
- i. Jasa Kontruksi, misalnya kelistrikan, jembatan, dan kontraktor bangunan.

3. Komponen – komponen Pendapatan

Sebenarnya pendapatan sama besarnya dengan uang yang dibelanjakan ditambah dengan uang yang di investasikan (modal) dan yang ditabung. Oleh karena itu pendapatan dalam arti luas (nasional) terdiri dari komponen – komponen sebagai berikut:

- a. Konsumsi seluruh lapisan masyarakat (rumah tangga, bisnis, dan pemerintah).
- b. Investasi untuk mendirikan atau memperluas usahanya.
- c. Tabungan akibat pengeluaran konsumsi yang diinvestasikan.

Bagi usaha kecil dan menengah yang tingkat pendapatannya rendah, tentu harus melakukan penghematan secara ketat terhadap segala bentuk pengeluaran, sehingga sangat keil kemungkinan untuk menabung. Sebaliknya, pada usaha kecl dan menengah yang tingkat pendapatannya sedang berarti ada kesinambungan antara pendapatan dan pengeluaran. Amun pada tingkat ini juga belum dapat berbuat banyak untuk meningkatkan suatu tabungan sebagai investasi.

4. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Komponen Pendapatan

a. Stock aktiva lancar

Sebagian besar orang memiliki aktiva lancar, seperti saham, obligasi, uang, dan tabanas. Semakin besar nilai aktiva lancar yang dimiliki konsumen, umumnya semakin besar pula keinginan konsumen untuk membeli barang dan jasa pada arus pendapatan yang siap pakai.

b. Utang

Besarnya utang dapat mempengaruhi kesediaan untuk berkonsumsi.

c. Sikap berhemat

Apabila konsumen beranggapan bahwa menabung itu baik, maka akan muncul kecenderungan untuk mengurangi pengeluaran konsumsi pada setiap arus pendapatan yang siap pakai.

d. Perpajakan

Pajak mengurangi pendapatan, maka pajak yang tinggi akan mengurangi besarnya pendapatan siap pakai. Dengan demikian akan berkurang pula pengeluaran konsumsinya.

e. Stock barang tahan lama yang dikuasai.

Jika banyak orang mampu membeli barang – barang tahan lama seperti mobil, rumah, lemari es, dan televisi misalnya, untuk sementara mereka tentu tidak ingin membeli lagi barang yang serupa. Karena hal tersebut pada umumnya konsumen akan lebih

suka menambah tabungannya atau mengurangi pengeluarannya untuk konsumsi pada setiap arus pendapatan siap pakainya.

f. Pengharapan

Pengharapan rumah tangga individu mengenai harga, pendapatan uang, dan ketersediaan barang dan jasa di masa depan, mempunyai pengaruh terhadap pengeluaran. Misalnya, apabila mengharapkan harga barang naik ataupun penipisan ketersediaan barang dan jasa, maka mereka cenderung menambah pengeluaran konsumsinya agar tidak perlu membayar harga yang lebih tinggi atau mengalami kesulitan untuk memperoleh barang yang diperlukan di kemudian hari ataupun sebaliknya.

f. Sebab-sebab ketimpangan pendapatan

Usia, pendapatan meningkat seiring dengan bertambahnya usia dan masa kerja seseorang, lewat dari batas itu, prtambahan usia akan diiringi dengan penurunan pendapatan (Miller, 2000).

Sebagian besar penyebab perbedaan tingkat pendapatan bersumber dari banyak sedikitnya investasi sumberdaya manusia pada masing-masing pekerja. Istilah investasi sumber daya manusia memiliki banyak makna. Secara umumnya istilah itu berarti suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang pekerja atau calon pekerja dalam rangka meningkatkan produktivitas marjinalnya, sekarang atau di masa mendatang (Miller, 2000). Wujud kegiatan itu antara lain adalah:

- a. Magang atau latihan kerja.
- b. Pendidikan formal.
- c. Pendidikan informal.
- d. Kegiatan-kegiatan dalam rangka memelihara dan mempertahankan kesehatan, serta:
- e. Migrasi.

g. Kebijakan Pemerintah tentang Usaha Kecil Dan Menengah

Berikut ini akan di paparkan kebijakan pemerintah tentang Usaha Kecil dan Menengah berkaitan dengan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, pembiayaan dan jaminan, dan iziin usaha (Tohar, 2000) yaitu sebagai berikut:

1. Iklim Usaha

Pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi Usaha Kecil dan Menengah melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan. Perundang-undangan dan kebijaksanaan tersebut mencakup tujuh aspek. Ketujuh aspek tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pendanaan

Penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan aspek pendanaan itu dimaksudkan untuk tujuan-tujuan berikut :

- 1) Memperluas sumber pendanaan, dengan berbagai upaya memperbanyak jenis dan meningkatkan alokasi pendanaan yang dapat dimanfaatkan Usaha Kecil dan Menengah.

- 2) Meningkatkan akses terhadap sumber pandangan yang mencakup berbagai upaya penyederhanaan tata cara dalam memperoleh dana.
- 3) Memberikan kemudahan dalam pendanaan dalam berbagai upaya pemberian keringanan persyaratan dalam pendanaan.

b. Persaingan

Penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan aspek persaingan itu dimaksudkan untuk tujuan - tujuan berikut :

- 1) Meningkatkan kerja sama sesama usaha kecil dan menengah dalam bentuk koperasi, asosiasi dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar - menawar usaha kecil dan menengah.
- 2) Mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk *monopoli*, *oligopoli* dan *monopsoni* yang merugikan usaha kecil dan menengah.
- 3) Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha kecil menengah.

c. Prasarana

Penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan aspek prasarana itu dimaksudkan untuk tujuan - tujuan berikut :

- 1) Mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan usaha kecil dan menengah.

- 2) Memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha kecil dan menengah.

d. Informasi

Penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan aspek informasi itu dimaksudkan untuk tujuan - tujuan berikut :

- 1) Membentuk dan memanfaatkan bank data dan jaringan informasi bisnis.
- 2) Mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, teknologi, desain dan mutu.

e. Kemitraan

Penetapan peraturan perundang - undangan dan kebijaksanaan aspek kemitraan itu dimaksudkan untuk tujuan-tujuan berikut.

- 1) Mewujudkan kemitraan.
- 2) Mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha kecil dan menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha menengah dan besar.

f. Perizinan Usaha

Penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan aspek perizinan usaha itu dimaksudkan untuk tujuan-tujuan berikut:

- 1) Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan dengan mengupayakan sistem pelayanan satu atap.
- 2) Memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan.

g. Perlindungan

Penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan aspek perlindungan itu dimaksudkan untuk tujuan - tujuan berikut:

- 1) Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi setra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, dan lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya.
- 2) Mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun menurun.
- 3) Mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan usaha kecil dan menengah melalui pengadaan secara langsung dari usaha kecil dan menengah.
- 4) Mengatur pengadaan barang atau jasa dan pemborongan tenaga kerja pemerintah.
- 5) Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.

2. Pembinaan dan Pengembangan

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah oleh pemerintah terutama ditujukan pada bidang - bidang berikut ini.

a. Produk dan pengolahan

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah dibidang produk dan pengelolaan dilakukan dengan cara - cara:

- 1) Meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengelolaan.
- 2) Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan.
- 3) Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan.

b. Pemasaran

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah dibidang pemasaran dengan cara-cara berikut:

- 1) Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran.
- 2) Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran.
- 3) Menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar.
- 4) Mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi.
- 5) Memasarkan produk usaha kecil dan menengah.

c. Sumber Daya Manusia

Pembinaan dan pengembangan uasaha kecil dan menengah dibidang sumber daya manusia dengan cara - cara berikut:

- 1) Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan.
- 2) Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial.
- 3) Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi usaha kecil dan menengah.
- 4) Menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan usaha kecil dan menengah.

d. Teknologi

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah dibidang teknologi dengan cara-cara berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu.
- 2) Meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru.
- 3) Memberikan insentif kepada usaha kecil dan menengah yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup.
- 4) Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi.
- 5) Meningkatkan kemampuan memenuhi standarisasi teknologi.
- 6) Menumbuh kembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi usaha kecil dan menengah.

3. Pembiayaan dan Penjaminan

Penyediaan pembiayaan oleh pemerintah terhadap usaha kecil dan menengah antara lain meliputi:

- a. Kredit perbankan.
- b. Pinjaman lembaga keuangan bukan bank.
- c. Pinjaman dari dana penyesihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara.
- d. Hibah, dan jenis pembiayaan lainnya.

Adapun untuk meningkatkan aset usaha kecil dan menengah terhadap pembiayaan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kemampuan dalam pemupukan modal sendiri.
- b. Meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan.
- c. Meningkatkan kemampuan manajemen keuangan.
- d. Menumbuh kembangkan lembaga penjamin.

4. Izin Usaha

Perzinan usaha merupakan alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan melindungi pengelolaan usaha. Bantuan yang diberikan pemerintah bisa berupa kemudahan dalam mengurus surat – surat izin usaha. Surat izin usaha ini antara lain sebagai berikut:

- a. Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

h. Peran Usaha Kecil dan Menengah dalam Meningkatkan Pendapatan

Upaya untuk meningkatkan wirausaha, khususnya pengembangan usaha kecil di Indonesia telah lama dilakukan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta. Berbagai kebijakan maupun bantuan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendorong perkembangan usaha-usaha kecil ini. Keseriusan pemerintah untuk menangani usaha kecil ini terlihat dengan dibentuknya menteri Koperasi dan Pemberdayaan Usaha Kecil dalam kabinet pembangunan VI.

Peranan usaha kecil terhadap pembangunan ekonomi sebuah Negara tidaklah kecil. Di AS, Jerman, Jepang serta beberapa negara maju lainnya, sejumlah usaha besar tumbuh melalui pembagian kerja dengan ribuan jenis usaha kecil, yang memproduksi bagian-bagian produksi yang dibutuhkan oleh pengusaha besar tersebut. Peranan usaha-usaha kecil di Indonesia juga tidaklah kecil. Bagi Indonesia, secara politis usaha kecil berperan dalam pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat. Sertamampu menjadi penampung atau tempat yang berfungsi untuk mengatasi masalah pengangguran yang kian merebak.

Menurut Koencoro (2003), Usaha kecil dalam rumah tangga mempunyai peran yang besar terhadap pemerataan pendapatan tenaga kerja di Indonesia, yang secara otomatis mampu menyerap tenaga kerja.

B. Peneliti Terdahulu

Dari hasil penelitian sebelumnya telah dilakukan penelitian dengan analisis, variabel dan pendekatan yang digunakan oleh peneliti sekarang, yang dimana peneliti sebelumnya menggunakan metode yang sama diantaranya penelitian yang dilakukan oleh:

No	PENELITI	JUDUL	MODEL	HASIL
1.	Herawati (2013)	Analisi Pengaruh Pendidikan, Upah, Pengalaman Kerja, Jenis Kelamin Dan Umur Terhadap Produktivitas Industri Shuttlecock Di Kota Tegal	Menggunakan analisis regresi linier berganda	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan, upah, pengalaman kerja, jenis kelamin dan umur berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja
2.	Mahendra (2014)	Analisi Pengaruh Pendidikan, Upah, Jenis Kelamin, Usia dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja di Semarang	Menggunakan analisis regresi linier berganda	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan, upah, jenis kelamin, usia dan pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja
3.	Ninik Hariyati (2010)	Peran Bank Syariah Dalam Mengoptimalkan UMKM Kota Yogyakarta	Pendekatan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jenis usaha rata-rata adalah kerajinan, dengan lama usaha 1 sampai 2 tahun.

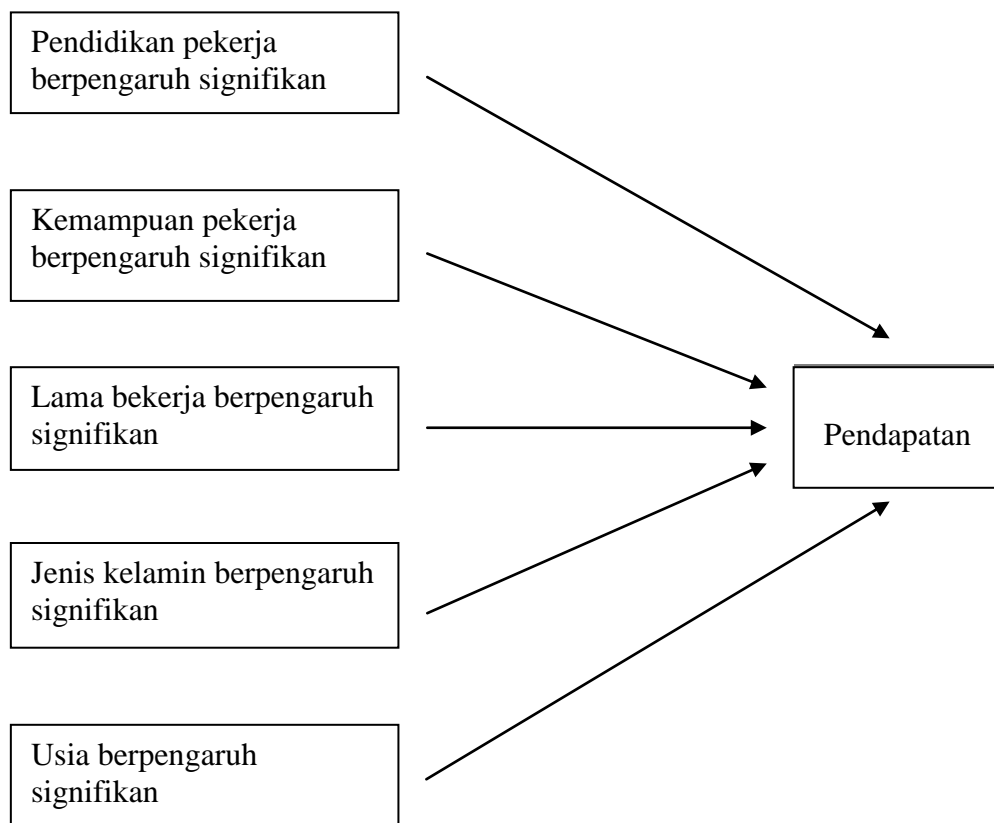
No	PENELITI	JUDUL	MODEL	HASIL
4.	Dian Andhiny Paramasari (2009)	Strategi Dinas Koperasi Dan UKM Kota Surakarta Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	Pendekatan deskriptif kualitatif.	Dari hasil analisis penelitian, dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta hanya menjalankan strategi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM. Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta melakukan kegiatankegiatan yaitu Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan Bagi UMKM, Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM, Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan, Penyusunan Kebijakan Tentang UMKM, dan Fasilitasi Pengembangan UMKM.

No	PENELITI	JUDUL	MODEL	HASIL
5.	Adelia Rosarindy Poetri (2010)	Adopsi <i>E-Commercy</i> dengan Pendekatan <i>Technologi Acceptance Model</i> (Tam) Bagi UKM	Pendekatan <i>Technology of Acceptance Model</i> (TAM).	<p>Hasil pengujian yang dilakukan mengindikasi bahwa <i>computer self efficacy</i> berpengaruh positif terhadap <i>perceived usefulness</i> dan <i>perceived ease of use</i>, <i>perceived usefulness</i> berpengaruh positif pada <i>attitude towards using</i> dan <i>intention to use</i>, <i>attitude towards using</i> berpengaruh positif terhadap <i>intention to use</i>, serta <i>intention to use</i> berpengaruh positif terhadap <i>actual usage</i>.</p> <p>Hasil pengujian juga mengindikasikan bahwa <i>perceived ease of use</i> berpengaruh secara negatif terhadap <i>perceived usefulness</i> dan <i>attitude towards using</i>.</p>

No	PENELITI	JUDUL	MODEL	HASIL
6.	Evanofalita (2007)	Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Sebagai Upaya Perluasan Kesempatan Kerja	Pendekatan Kualitatif	Hasilnya adalah : 1. UKM yang ada di Kota Malang tersebar secara merata di 5 Kecamatan dan 57 Kelurahan. 2 .Kelebihan UKM yang ada di Kota Malang adalah mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup signifikan hampir 1.5% dari jumlah penduduk di Kota Malang, dengan nilai usaha pertahun mencapai 10-50 juta perunit usaha, modal yang digunakan untuk membuka usaha merupakan modal pribadi, segmen pasarnya menjangkau kalangan menengah ke atas dan menengah ke bawah baik yang ada di dalam maupun di luar kota.

No	PENELITI	JUDUL	MODEL	HASIL
7.	Sutrisni (2010)	Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Desain Produk, Harga dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Pelanggan Indosat Im3 pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang	Pendekatan analisis kuantitatif dan pendekatan analisis kualitatif.	Hasil analisis mendapatkan bahwa kelima faktor kualitas produk, kualitas pelayanan, desain produk, harga dan kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan.

C. Kerangka Pikir



D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, dan landasan teori yang telah dikemukakan maka dapat dibuat suatu hipotesis sebagai berikut :

1. Bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pekerja Manding Kabupaten Bantul.
2. Bahwa kemampuan pekerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pekerja Manding Kabupaten Bantul.
3. Bahwa lama bekerja berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pekerja Manding Kabupaten Bantul.
4. Bahwa jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pekerja Manding Kabupaten Bantul.
5. Bahwa usia berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pekerja Manding Kabupaten Bantul.